

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum/S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata
Kode Matakuliah	:
SKS	: 4
Dosen Pengampu	: Dr. Nur Arifudin,S.H., M.H., Deny Slamet Pribadi,S.H., M.H., Erna Susanti,S.H.,M.H.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) :

Aspek Sikap:

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami dan menerapkan bagaimana dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pelaksana tugas dalam bidang hukum Acara Perdata.

Aspek Ketrampilan Umum:

Mahasiswa diharapkan lebih memahami tentang pelaksanaan hukum acara perdata dan praktiknya.

Aspek Ketrampilan Khusus:

Diharapkan mahasiswa memahami tentang Teory dan Peraturan serta pelaksanaan dalam hukum acara perdata dan praktik peradilan perdata di Indonesia.

Aspek Pengetahuan:

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan mempraktekkan menyelesaikan permasalahan perdata di Indonesia berdasarkan teori dan hukum acara perdata.

PIP Unmul yang diintegrasikan :

Dalam hal ini apabila ada penyelesaian kasus hukum perdata yang berkaitan dengan wilayah, lingkungan dan kekhsan kalimantan timur secara khusus dan Indonesia secara umum yang dirugikan dengan harus diselesaikan menggunakan Hukum acara perdata dan praktik peradilan perdata.

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan mempraktekkan menyelesaikan permasalahan perdata di Indonesia berdasarkan teori dan hukum acara perdata. Dan mahasiswa dapat lebih memahami dan menerapkan bagaimana dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pelaksana tugas dalam bidang hukum. Serta Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan mempraktekkan menyelesaikan permasalahan perdata di Indonesia berdasarkan teori dan hukum acara perdata.

Diharapkan juga mahasiswa mampu penyelesaian kasus hukum perdata yang berkaitan dengan wilayah, lingkungan dan kekhsan kalimantan timur secara khusus dan Indonesia secara umum yang dirugikan dengan harus diselesaikan menggunakan Hukum acara perdata dan praktik peradilan perdata.

B. Kemampuan Khusus (KK)

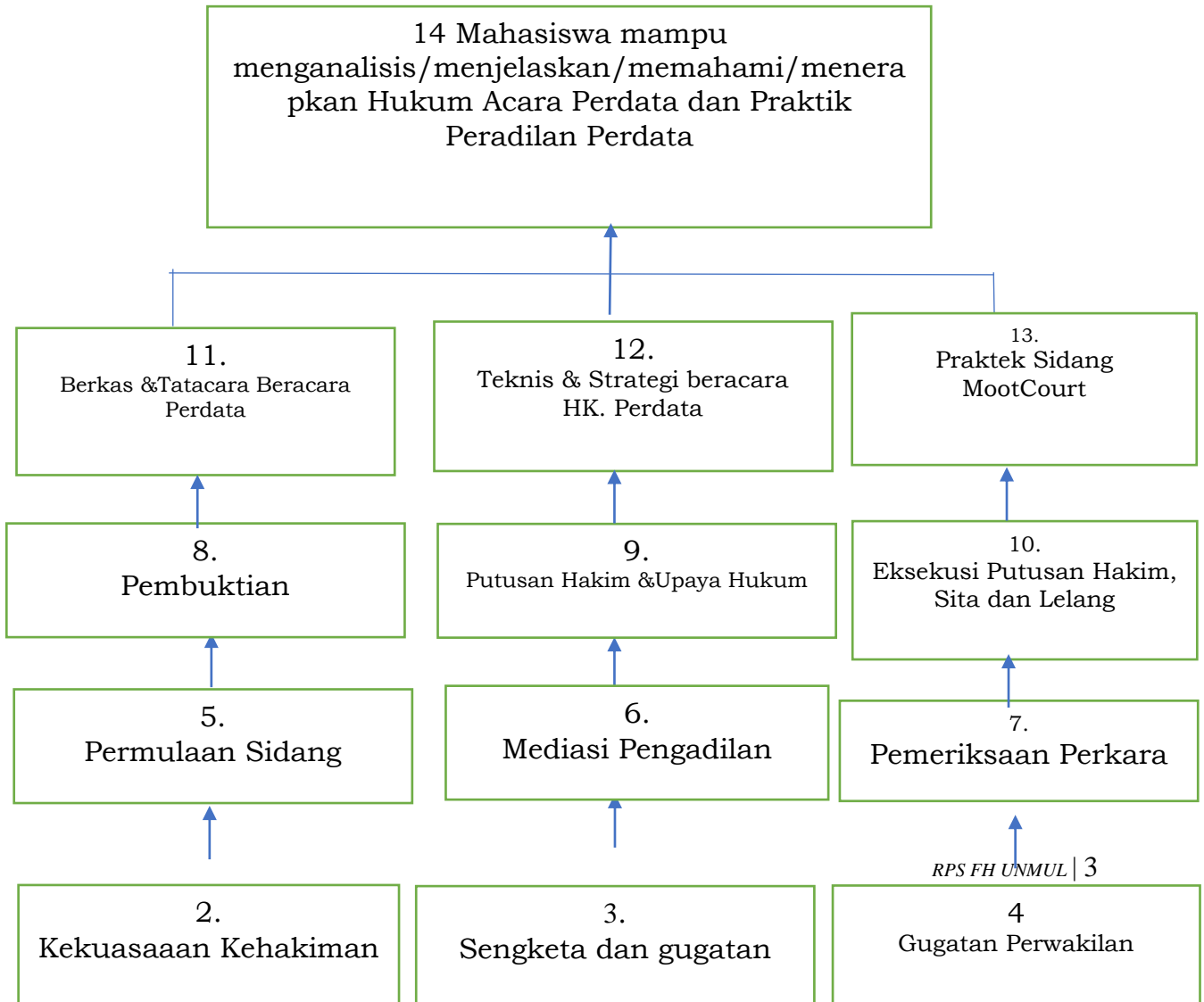
Dalam Kemampuan khusus (KK) kepada mahasiswa ini, berkaitan dengan mata kuliah yang dipelajari yang diberi nama Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata yang merupakan lanjutan dari Hukum Perdata, maka diharapkan :

1. Mahasiswa dapat mengetahui tentang Sejarah, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata
2. Mahasiswa dapat memahami tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Acara Perdata serta praktik dalam peradilan acara perdata

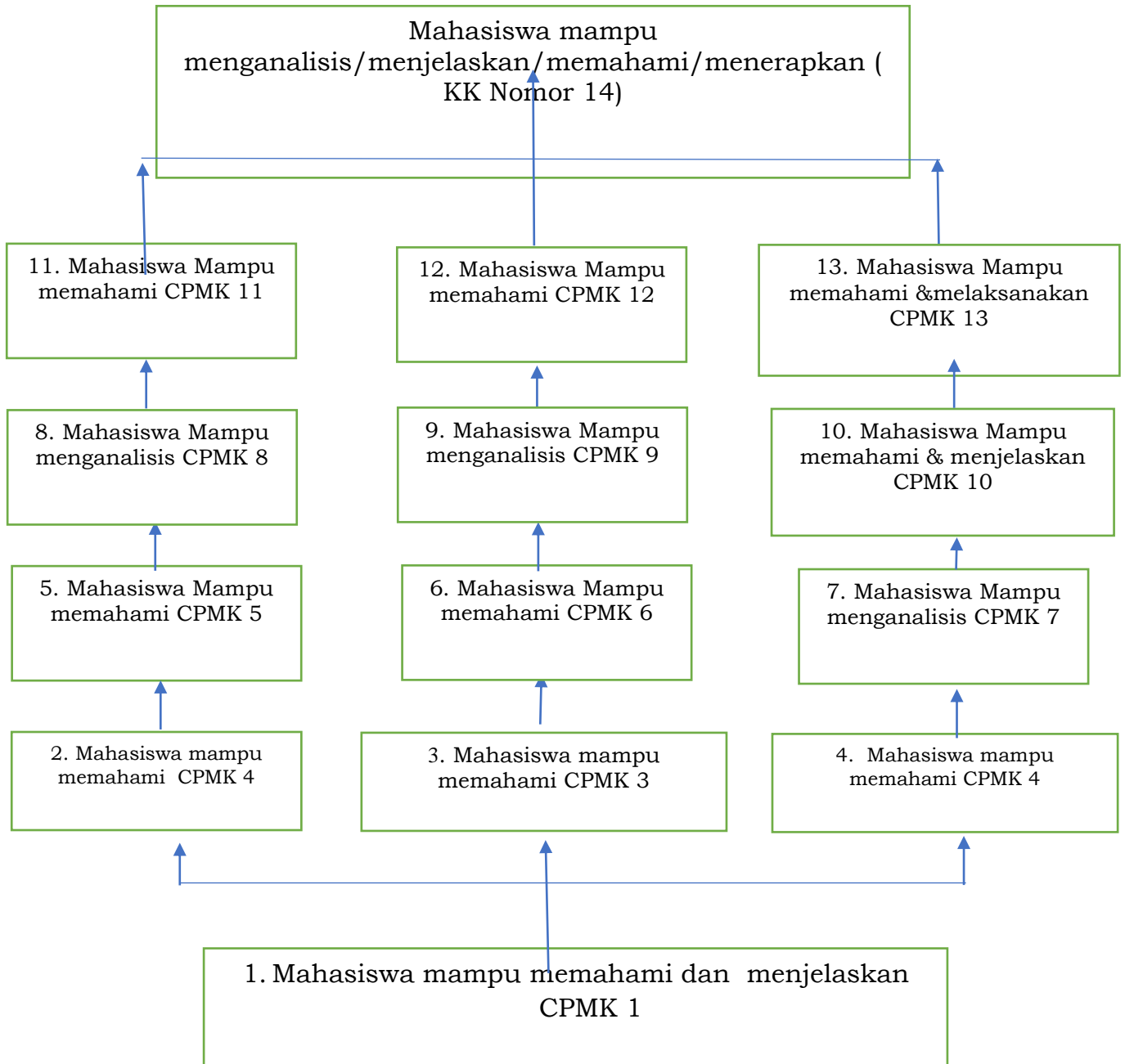
3. Mahasiswa dapat menganalisis mengenai sengketa hukum perdata dan acara perdata serta praktiknya, yang berkaitan dengan:
 - Gugatan, eksepsi, replik dan Duplik, Kesimpulan dan Putusan dalam acara Perdata.
 - Permulaan Sidang praktik peradilan perdata
 - Mediasi Pengadilan
 - Pemeriksaan Perkara
 - Pembuktian
 - Putusan Hakim
 - Upaya Hukum
 - Eksekusi Putusan Hakim
 - Sita dan Lelang.
4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sengketa sampai dengan penyelesaian dari hukum perdata di dalam praktik peradilan perdata.
5. Mahasiswa dapat melakukan praktik simulasi/peradilan semu dalam sengketa hukum perdata.

2. Analisis Pembelajaran

A. Peta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)



B. Peta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Kemampuan Khusus (KK)





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
JURUSAN ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	5/27

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman

Fakultas : Hukum

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum / S-1 Ilmu Hukum

Matakuliah : Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan Peradana

Kode Matakuliah :

SKS : 4

Dosen Pengampu : Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., Deny Slamet Pribadi, S.H., M.H.

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang berbagai Sumber Hukum dan asas acara perdata, berbagai peraturan acara perdata yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, konsep-konsep pengembangan peraturan acara perdata, penyelesaian sengketa atau kasus di bidang perdata. Serta Tata Acara Peradilan dan MoodCourt Praktek Peradilan Perrdata.

Capaian Pembelajaran MK : Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan mempraktekkan menyelesaikan permasalahan perdata di Indonesia berdasarkan teori dan hukum acara perdata.

Daftar Referensi :

Algra, N.E., H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Toeloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah. 1983. Kamus Istilah Hukum Foeckema Andreae: Belanda – Indonesia. Jakarta: Bina Cipta.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
JURUSAN ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	6/27

- Bidara, O., dan Martin P. Bidara. 1987. Ketentuan Perundang-undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI tentang Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Dja'is, Mochamad dan RMJ. Koosmargono. 2007. Membaca dan Mengerti HIR. Semarang: Percetakan Oetama.
- Engelbrecht. tt. Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia. Jakarta: Internusa.
- Harahap, M. Yahya. "Beberapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman," Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan PP IKAHI DKI dan Bandung pada 5 Agustus 2002 di Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2001. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika.
- John J. Cound. 1985. Cs Civil Procedure: Case and Materials. St. Paul Minn: West Publishing.
- Kurdianto. 1991. Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Suarabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Mertokoesoemo, Sudikno. 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia.
- Ali, Chidir. Yurisprudensi Tentang Hukum Pembuktian Jilid I.
- Ali, Chidir. Yurisprudensi Tentang Hukum Pembuktian Jilid II.
- Anser, W.D.H. Perubahan Hukum Acara Perdata Netherland. (Alih
- Asser, C. Pengajian Hukum Belanda. Jakarta : Dian Rakyat,
- Bachar, Djazuli. Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum. Cet. 2. Jakarta : CV Akademika Pressindo Anggota IKAPI, 1995



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
JURUSAN ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	7/27

Bahasa oleh Retnowulan Sutantio)Jakarta : Bina Justitia,

Bandung : Binacipta, cet.I, 1981.

Bandung : Binacipta, cet.I, 1981.

-----Bewijslatverdeling. Kluwer : Gouda Quint bv-Arhem,

Bidara.O . et.al. Hukum Acara Perdata. Cet.2. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.

Binawan Al Andang. Hukum, Hakim, Hikmat Catatan Tambahan Untuk Prof. Satjipto Rahardjo. Kompas tanggal
1 November 2002.

Budiarto, Ali.Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hutang Piutang.Cet.1. Jakarta :
Ikahi. April 2000.
cet.I, 1991.

Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Rancangan UU-RI Tentang Hukum Acara Perdata.Direktorat
Perundangan-Undangan, Tahun 1999/2000.

Dijksterhuis H.L.G- Wieten. Bewijsrecht In Civiele

Dirdjosisworo, Soedjono. Memorandum Hukum (Media Untuk Melatih Penulisnya Menerapkan Hukum Positif
Dalam Meyelesaikan Perkara). Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Gouda Quint bv-Arhem, 1995.

Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Cet. 3. Jakarta : PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1991.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
JURUSAN ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	8/27

Himpunan Pranata Peradilan. Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1979.

Hukum Varia Peradilan No. 133, Oktober 1996.

Hukum. Bandung: Mandar Maju, 1999.

Justitia, 1994.

Koesmojo, Ida. Peraturan Baru Hukum Pembuktian Dalam

Koesnoe, Moh. Dasar-Dasar Ke-Tidak Pastian Hukum

Lintasan Tentang Dasar Perkembangannya)Majalah

Mahkamah Agung RI. Abstrak Surat Petunjuk Mahkamah Agung RI Tahun 1951-1993. Jakarta:1997.

Mahkamah Agung, 1994.

Menanggung. Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 1995.

Mulyadi, Lilik. Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Penanggungan (Borgtoch) Dan Perikatan Tanggung

Penyelesaian Perkara Perdata di Nederland. Jakarta : Bina

Perdata Pada Praktek Pengadilan. Jakarta : Jambatan,

Perdata. Bandung : Alumni1992.

Procedure. Kluwer : Deventer, Tweede Druk, 1992.

-----Rechtspraakoverzicht Bewijslastverdeling. Kluwer :

Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan, Pribadi

Setiawan. Aneka Masalah hukum dan Hukum Acara



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
JURUSAN ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...
Tgl. Terbit : ...
No. Revisi : ...
Hal : 9/27

Sidharta, Bernard Arief. Refleksi Tentang Struktur Ilmu

Soeroso, R. Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan. Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Soetantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek. Cet.8.
Jakarta: CV. Mandar Maju,1997.

Subekti, R. Hukum Acara Perdata,Cet. 2, Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen
Kehakiman, 1997.

Subekti, R. Hukum Acara Perdata. Cet. 3. Bandung : Bina Cipta, 1989.

Pertemuan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Strategi dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
1	Mahasiswa mampu menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan teori dasar hukum acara perdata.	Pengertian Hukum Acara Perdata.	Ceramah dan tanya jawab	3x(2x50)	Tes : Non tes :	- Presentasi - Sikap dan perilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi)	10%	Ref. Wajib: 1,2



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
 JURUSAN ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...
 Tgl. Terbit : ...
 No. Revisi : ...
 Hal : 10/27

2	Mahasiswa mampu menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan isi materi tata cara beracara perdata	Pengenalan dasar hukum acara perdata	Ceramah dan tanya jawab	3x(2x50)	Tes : Non tes :	- Presentasi - Sikap dan prilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi)	10%	Ref. Wajib: 1,2
3	Mahasiswa mampu menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa dapat menerapkan teori-teori hukum perdata.	Penerapan dan Pengembangan Peraturan Acara Perdata di Indonesia	Ceramah dan tanya jawab	3x(2x50)	Tes : Non tes :	- Presentasi - Sikap dan prilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi)	10%	Ref. Wajib: 1,2
4	Mahasiswa mampu menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan isi materi tata cara beracara perdata	Penerapan tentang materi acara Perdata yang berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Gugatan • Pemeriksaan perkara dimuka sidang • pembuktian • keputusan pengadilan • Penyitaan • Acara 	Ceramah dan tanya jawab	3x(2x50)	Tes : Non tes :	- Presentasi - Sikap dan prilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi)	10%	Ref. Wajib: 1,2



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
 JURUSAN ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...
 Tgl. Terbit : ...
 No. Revisi : ...
 Hal : 11/27

			verstek <ul style="list-style-type: none"> • Banding • kasasi 						
5	Mahasiswa mampu menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan isi materi tata cara beracara perdata	Penerapan tentang materi acara Perdata yang berupa : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gugatan Perwakilan kelompok (class Action). ▪ Putusan akta perdamaian dalam rangka sistem mediasi. 	Ceramah dan tanya jawab	3x(2x50)	Tes : Non tes :	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi - Sikap dan prilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi) 	10%	Ref. Wajib: 1,2
6	Mahasiswa mampu menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan isi materi tata cara beracara perdata	Penerapan tentang materi acara Perdata yang berupa : <ul style="list-style-type: none"> * Upaya hukum * Eksekusi Putusan Hakim * Sita dan Lelang 	Ceramah dan tanya jawab	2x(2x50)	Tes : Non tes :	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi - Sikap dan prilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi) 	10%	Ref. Wajib: 1,2



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
 JURUSAN ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...
 Tgl. Terbit : ...
 No. Revisi : ...
 Hal : 12/27

7	Mahasiswa mampu menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan isi materi tata cara beracara perdata	Praktek Pembuatan Gugatan serta revisi Substabsi dari : * Gugatan *Eksepsi Tergugat	Latihan Pembuatan Penulisan Gugatan dan Eksepsi serta Diskusi dan menganalisis mengenai kasus Perdata	3x(2x50)	Tes : Non tes :	- Praktek pelatihan pembuatan penulisan berkas praktek Peradilan Perdata	10%	Ref. Wajib: semua tentang Praktek Peradilan
8	Mahasiswa mampu menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan isi materi tata cara beracara perdata	Praktek Pembuatan dan revisi Substabsi dari : * Replik *Duplik * Pembuktian	Latihan Pembuatan Penulisan Replik dan Duplik serta Pembuktian dan Diskusi dan menganalisis mengenai kasus Perdata	3x(2x50)	Tes : Non tes :	- Praktek pelatihan pembuatan penulisan berkas praktek Peradilan Perdata	10%	Ref. Wajib: semua tentang Praktek Peradilan
9	Mahasiswa mampu menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan isi materi tata cara beracara perdata	Praktek Pembuatan dan revisi Substabsin dari : *Kesimpulan * Putusan	Latihan Pembuatan Penulisan Kesimpulan, Putusan menganalisis mengenai kasus Perdata	3x(2x50)	Tes : Non tes :	- Praktek pelatihan pembuatan penulisan berkas praktek Peradilan Perdata	10%	Ref. Wajib: semua tentang Praktek Peradilan
10	Mahasiswa mampu menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan isi materi tata cara beracara perdata	Penjelasan dan Praktek Tata Cara Pelaksana Peradilan Perdata : * Hakim *Penggugat *Tergugat	Latihan Pelaksanaan Pelaksana Peradilan Acara Perdata: * Hakim *Penggugat *Tergugat	2x(2x50)	Tes : Non tes :	- Praktek pelatihan pembuatan penulisan berkas praktek Peradilan Perdata	10%	Ref. Wajib: semua tentang Praktek Peradilan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
 JURUSAN ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...
 Tgl. Terbit : ...
 No. Revisi : ...
 Hal : 13/27

11	Mahasiswa mampu menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan isi materi tata cara beracara perdata	Penjelasan dan Praktek Tata Cara Pelaksana Peradilan Perdata : * Saksi *Advocat *Panitera	Latihan Pelaksanaan Pelaksana Peradilan Acara Perdata: * Saksi *Advocat *Panitera	2x(2x50)	Tes : Non tes :	- Praktek pelatihan pembuatan penulisan berkas praktek Peradilan Perdata	10%	Ref. Wajib: semua tentang Praktek Peradilan
12	Mahasiswa mampu menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan isi materi tata cara beracara perdata	Penjelasan dan Praktek Tata Cara Pelaksana Peradilan Perdata : * Upaya Hukum * Lelang *Sita	Latihan Pelaksanaan Pelaksana Peradilan Acara Perdata: * Upaya Hukum *lelang *Sita	2x(2x50)	Tes : Non tes :	- Praktek pelatihan pembuatan penulisan berkas praktek Peradilan Perdata	10%	Ref. Wajib: semua tentang Praktek Peradilan
13	Mahasiswa mampu menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan isi materi tata cara beracara perdata	Persiapan Pemberkasan dan Pelaksana Praktek	Persiapan Pemberkasan dan Pelaksana Praktek Peradilan Semu /Mootcourt peradilan perdata	2x(2x50)	Tes : Non tes :	- Praktek pelatihan pembuatan penulisan berkas praktek Peradilan Perdata	10%	Ref. Wajib: semua tentang Praktek Peradilan

Catatan:

Pengalaman belajar yang dirumuskan akan terkait dengan kegiatan belajar, penugasan, diskusi, dan atau presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan inti pada RPP.



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman

Fakultas : Hukum

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum / S-1 Ilmu Hukum

Matakuliah : Hukum Acara Perdata dan Praktek Perdata

Kode Matakuliah :

SKS : 4

Pertemuan ke : 1-16 Pertemuan

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang berbagai Sumber Hukum dan asas acara perdata, berbagai peraturan acara perdata yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, konsep-konsep pengembangan peraturan acara perdata, penyelesaian sengketa atau kasus di bidang perdata. Serta Tata Acara Peradilan dan MoodCourt Praktek Peradilan Perrdata.

Capaian Pembelajaran MK : Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan mempraktekkan menyelesaikan permasalahan perdata di Indonesia berdasarkan teori dan hukum acara perdata.

Indikator : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan teori dasar hukum acara perdata.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
JURUSAN ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	15/27

Tujuan Pembelajaran, : Setelah menempuh perkuliahan ini: Mahasiswa dapat memahami tentang Asas- asas Hukum Acara Perdata dan Sumber Hukum acara Perdata.

Materi Pokok (Bahan Kajian):

Sumber Hukum Acara Perdata dan Asas- asas Hukum Acara Perdata dan pemahaman tentang Acara Perdata

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	Berdoa dan penjelasan tentang tahapan perkuliahan	Ceramah dan tanya jawab	15 Menit	LCD dan literatur	Sikap/perilaku
2	Inti	Pemberian Materi	Ceramah dan tanya jawab	1 jam	LCD dan literatur	Sikap/perilaku
3	Akhir	Tanya jawab dan Diskusi	Tanya jawab	15 menit	LCD dan literatur	Tes/nontes.

Referensi:

Algra, N.E., H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Toeloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah. 1983. Kamus Istilah Hukum Foeckema Andreae: Belanda – Indonesia. Jakarta: Bina Cipta.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
JURUSAN ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	16/27

- Bidara, O., dan Martin P. Bidara. 1987. Ketentuan Perundang-undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI tentang Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Dja'is, Mochamad dan RMJ. Koosmargono. 2007. Membaca dan Mengerti HIR. Semarang: Percetakan Oetama.
- Engelbrecht. tt. Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia. Jakarta: Internusa.
- Harahap, M. Yahya. "Beberapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman," Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan PP IKAHI DKI dan Bandung pada 5 Agustus 2002 di Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2001. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika.
- John J. Cound. 1985. Cs Civil Procedure: Case and Materials. St. Paul Minn: West Publishing.
- Kurdianto. 1991. Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Suarabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Mertokoesoemo, Sudikno. 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia.
- Ali, Chidir. Yurisprudensi Tentang Hukum Pembuktian Jilid I.
- Ali, Chidir. Yurisprudensi Tentang Hukum Pembuktian Jilid II.
- Anser, W.D.H. Perubahan Hukum Acara Perdata Nederland. (Alih Asser, C. Pengajian Hukum Belanda. Jakarta : Dian Rakyat,
- Bachar, Djazuli. Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum. Cet. 2. Jakarta : CV Akademika Pressindo Anggota IKAPI, 1995
- Bahasa oleh Retnowulan Sutantio) Jakarta : Bina Justitia,



Bandung : Binacipta, cet.I, 1981.

Bandung : Binacipta, cet.I, 1981.

-----Bewijslatverdeling. Kluwer : Gouda Quint bv-Arhem,

Bidara.O . et.al. Hukum Acara Perdata. Cet.2. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.

Binawan Al Andang. Hukum, Hakim, Hikmat Catatan Tambahan Untuk Prof. Satjipto Rahardjo. Kompas tanggal
1 November 2002.

Budiarto, Ali.Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hutang Piutang.Cet.1. Jakarta :
Ikahi. April 2000.
cet.I, 1991.

Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Rancangan UU-RI Tentang Hukum Acara Perdata.Direktorat
Perundangan-Undangan, Tahun 1999/2000.

Dijksterhuis H.L.G- Wieten. Bewijsrecht In Civiele

Dirdjosisworo, Soedjono. Memorandum Hukum (Media Untuk Melatih Penulisnya Menerapkan Hukum Positif
Dalam Meyelesaikan Perkara). Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Gouda Quint bv-Arhem, 1995.

Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Cet. 3. Jakarta : PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1991.

Himpunan Pranata Peradilan.Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1979.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
JURUSAN ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	18/27

Hukum Varia Peradilan No. 133, Oktober 1996.

Hukum. Bandung: Mandar Maju, 1999.

Justitia, 1994.

Koesmojo, Ida. Peraturan Baru Hukum Pembuktian Dalam

Koesnoe, Moh. Dasar-Dasar Ke-Tidak Pastian Hukum

Lintasan Tentang Dasar Perkembangannya)Majalah

Mahkamah Agung RI. Abstrak Surat Petunjuk Mahkamah Agung RI Tahun 1951-1993. Jakarta:1997.

Mahkamah Agung, 1994.

Menanggung. Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 1995.

Mulyadi, Lilik. Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Penanggungan (Borgtoch) Dan Perikatan Tanggung

Penyelesaian Perkara Perdata di Nederland. Jakarta : Bina

Perdata Pada Praktek Pengadilan. Jakarta : Jambatan,

Perdata. Bandung : Alumni1992.

Procedure. Kluwer : Deventer, Tweede Druk, 1992.

-----Rechtspraakoverzicht Bewijslastverdeling. Kluwer :

Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan, Pribadi

Setiawan. Aneka Masalah hukum dan Hukum Acara

Sidharta, Bernard Arief. Refleksi Tentang Struktur Ilmu